

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SEKTOR PENDIDIKAN: (BANTUAN
BEASISWA TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013-2016)**

Oleh :

Dahlana Dewi Fitri

Email: Dalenadewi@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/fax. 0761-63277

Abstract

Scholarships are grants in the form of financial assistance provided to individuals, students or students who aim to be used for the sustainability of education pursued. The meaning of government management is a typical process consisting of acts of planning, organizing, mobilization and control are undertaken to determine and achieve the goals that have been determined. This study aims to determine the Roles and Obstacles of Local Government in the Education Sector: (scholarship assistance to poor people in Kuantan Singingi Regency Year 2013-2016).

This research uses qualitative research method with descriptive research type, which can be interpreted as problem-solving process investigated by describing the circumstances of research subject based on facts that appear during the research which then continued with based on existing theories. Budget for scholarship assistance is less Capable of this is still decreased every budget, while in the role of government has not optimal because there is still a lot of cheating and aid is not right target due to many manipulation of data and game from unscrupulous government in choosing.

The conclusion of this study states that the budget for scholarship aid for the underprivileged, especially for the education sector of university level students is still considered inadequate, this is because the amount of budget given by the local government is still fluctuating / decreasing in every budget year, the role of government based on The survey is known that in the distribution of scholarship aid is still found a lot of fraud and assistance that is not right target, especially in terms of supervision and selection of acceptance is still encountered some lack of much encountered data manipulation by the applicant as well as the game from the government itself who flew to vote on receiving assistance.

Keywords: Role, Government Management, Beasiwa Help

A. Pendahuluan

Seiring dengan bertambahnya penduduk yang tidak terkontrol mengakibatkan adanya masalah-masalah sosial, salah satunya di sektor pendidikan. Terutama dikalangan masyarakat kurang mampu. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya (Kunaryo, 2000: 21). Pendidikan dalam arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih.

hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor kesehatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dalam hal ini diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun tugas dan fungsi dari bagian Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pasal 2 kedudukan sekretariat daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah. Dalam pasal 4 menjelaskan bahwa sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pemerintah daerah mempunyai dasar hukum dalam penetapan dan persyaratan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa yaitu sesuai dengan surat keputusan bupati Kuantan Singingi bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya

Manusia yang berkualitas dibidang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dipandang perlu diberikan bantuan dana pendidikan. Kemudian pemberian dana bantuan pendidikan lebih diarahkan kepada mahasiswa yang berprestasi kurang mampu baik dalam jenjang pendidikan Diploma III maupun Strata 1.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu dengan cara memberikan beasiswa sesuai dengan tingkat pendidikannya. Adapun besaran dana bantuan yang akan diberikan ini untuk S-1 Rp2.500.000, khusus mahasiswa S-1 yang sedang melakukan penelitian akan dibantu Rp1.500.000, untuk D-3 Rp 2.000.000, dan S-2 Rp 3000.000.

Dana anggaran bantuan pendidikan pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kuantan Singingidari tahun 2013-2016

N o	Tahun	Total Dana Anggaran Keseluruhan	Jumlah Mahasiswa yang menerima beasiswa
1	2013	500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	201 (Orang)
2	2014	941.000.000 (Sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah)	400 (Orang)
3	2015	500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	212 (Orang)

4	2016	500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	212 (Orang)
---	------	--------------------------------------	-------------

Sumber: Kesos Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

Fenomena yang terjadi saat ini dapat dilihat dari tabel, bahwa perkembangan dana anggaran bantuan beasiswa kurang mampu di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun ketahun mengalami flutuaktif / peningkatan dan penurunan yakni dari tahun 2013-2016.

Dimana pada tahun 2013 total dana anggaran keseluruhan pendidikan masyarakat kurang mampu sebanyak 500.000.000 juta, kemudian tahun 2014 total dana anggaran pendidikan masyarakat kurang mampu 941.000.000 juta , dan tahun 2015 total dana anggaran pendidikan masyarakat kurang mampu sebanyak 500.000.000 juta , terakhir tahun 2016 total dana anggaran pendidikan masyarakat kurang mampu tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Kesos Sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Erdison, bahwa proposal yang diusulkan akan diverifikasi untuk Bantuan biaya pendidikan yang akan diberikan bagi mahasiswa kurang mampu. Kemudian dari hasil verifikasi akan diseleksi kembali dengan cara pemerintah daerah turun kelapangan untuk mengecek kebenaran proposal yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, namun

pada kenyataannya tidak semua isi proposal sesuai dengan di lapangan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan: (Bantuan Beasiswa Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2016).**

B. Kerangka Teori

1. Manajemen Pemerintah

Dharma setyawan salam (2004:12) mengemukakan manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang berkerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2001:10) manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lainnya.

Mempelajari manajemen harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim (POCAC) yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organising* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan)

2. Peran

Menurut Miftah Thoha (2008:10) peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau arah tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal, selanjutnya dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merumuskan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atau suatu pekerjaan.

3. Kewenangan daerah

Ramlan surbakti mendefenisikan kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini, termasuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah adalah

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang vital bagi perkembangan manusia, tanpa adanya pendidikan ilmu pengetahuan menjadi sebuah hal yang sia-sia karena tidak terdapat proses pembelajaran sebagaimana yang terdapat didalam proses mendidik. Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional. Ada dua tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945:

- a. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya

kebudayaan Indonesia yang kaya raya untuk meningkatkan mutu kehidupan maupun masyarakat secara keseluruhan.

5. Masyarakat kurang mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan Qualitative Approach (pendekatan kualitatif). Metode penelitian kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian kali ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan dengan teori yang dikemukakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan hanya untuk menggambarkan keadaan nyata

dilapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun untuk analisa penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan (informan) tertentu, penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya. **Djma'an satori dan Aan Komariah. (2010:39)**

Penelitian ini dilakukan diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data, Data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Analisis data adalah Data yang telah terkumpul dalam data mentah akan dikelompokkan berdasarkan jenis kemudian diolah. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kalimat untuk dianalisa dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Manajemen Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan (bantuan beasiswa masyarakat kurang mampu)

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan, setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan.

Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan – keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Aspek- aspek perencanaan pemerintah:

1. Dokumen perencanaan
2. Kegiatan yang direncanakan
3. Proses perencanaan
4. Tahapan penyusunan perencanaan

Perencanaan pertama yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu yaitu dengan membuat program, harus mengumpulkan data atau proposal, memproses data terlebih dahulu. Bahkan membuat organisasi dan prosedur kerja sehingga bisa tercapai perencanaan dengan efektif.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabag Kesra Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa :

“Bantuan beasiswa menjadi perencanaan pemerintah daerah di karenakan pemerintah daerah ingin melaksanakan pendidikan itu lebih dari 20% dari anggaran, karena di APBD anggaran sudah di tentukan 20% untuk pendidikan, dan pendidikan merupakan urusan wajib daerah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya mahasiswa.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pendidikan itu sudah menjadi urusan wajib bagi daerah untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu, di anggaran APBD sudah ditentukan bagian untuk pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi ingin melaksanakan pendidikan 20% lebih dari anggaran APBD yang ditetapkan, akan tetapi anggaran untuk bantuan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang kurang mampu dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuasi.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian suatu kelembagaan sangatlah penting salah satunya adalah sumber dayanya, keterampilan dan kapasitas yang secara serius dapat memberi kontribusi nyata bagi kelangsungan program bantuan beasiswa kurang mampu. Apabila pengorganisasian kelembagaan buruk maka program bantuan beasiswa akan semakin menurun dan bisa –bisanya akan hilang dimasa akan datang.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabag Kesra Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa :

“Keterlibatan pengorganisasian pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam upaya memberikan bantuan beasiswa tersebut yaitu dengan mensurvey ke lapangan, dan organisasi tersebut melakukan

survey dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan dari hasil survey itu organisasi tersebut mengetahui mana yang pantas untuk mendapatkan bantuan beasiswa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa organisasi dalam pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi ikut terlibat dalam memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu yaitu dengan mensurvey agar bisa mengetahui mana yang berhak menerima bantuan beasiswa tersebut.

c. Penggerakan

Menurut Dharma Setyawan Salam Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Kabag kesejahteraan rakyat membagi tugas-tugas kepada bawahan atau pegawai yang ada dibagian Kesra untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kabag kesra kabupaten kuantan singingi Erdison menyatakan bahwa:

Saya memberikan arahan dan tugas kepada pegawai saya yang ada dibagian Kesra untuk dapat menerima proposal yang

dikumpulkan oleh mahasiswa sesuai dengan prosedur yang ada

Dapat kita ketahui bahwa proposal yang dibuat oleh mahasiswa untuk menerima bantuan beasiswa tersebut dengan sesuai prosedur yang telah ada diterima oleh pegawai yang dibagian kesra dan tentunya pegawai tersebut dapat arahan dari pimpinannya.

d. Pengawasan

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan kegiatan, pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengarahan dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mustafa menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian

bantuan beasiswa yaitu dengan adanya pengawasan yang tidak luput dari pengawasan legislatif dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam bantuan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu salah satunya berupa uang

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui Badan Legislatif ikut mengawasi dalam pengendalian bantuan beasiswa tersebut dan bantuan beasiswa yang diberikan pemerintah tersebut juga kita ketahui salah satunya berupa uang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa Kuangsing menyatakan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan pemerintah kurang optimal karena masih banyak terdapat bantuan beasiswa kurang tetap sasaran

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sebagaimana yang kita ketahui pengawasan pemerintah terhadap bantuan beasiswa tersebut kurang optimal dikarenakan bantuan beasiswa tersebut tidak tepat sasaran, banyak penerima yang dikategorikan karna mempunyai kenalan dengan oknum pemerintah, bukan dikarenakan menerima telah lolos seleksi yang telah dilaksanakan.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Bantuan Beasiswa

Kebijakan pemerintah daerah yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan program bantuan beasiswa kurang mampu yang diharapkan tidak salah sasaran dalam menentukan siapa yang berhak menerima dan tidak berhak menerima.

Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program bantuan beasiswa masyarakat kurang mampu ini dengan cara mengumpulkan proposal, dan memverifikasi proposal tersebut dengan cara turun kelapangan agar dapat menentukan mana yang berhak menerima dan tidak berhak menerima bantuan beasiswa tersebut karena pemerintah disini ingin berperilaku adil tidak ada kecurangan dalam memberikan bantuan beasiswa kurang mampu ini. Adapun Sasaran pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberian beasiswa kurang mampu adalah Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu (D3,S1, Penelitian dan Pasca Sarjana).

Akan tetapi di Kabupaten Kuantan Singingi bantuan beasiswa untuk pasca sarjana hanya diberikan ditahun 2013, karena menurut pemerintah orang yang melanjutkan pasca sarjana berarti orang yang mampu. Adapun Sumber dana bantuan pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada mahasiswa kurang

mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proposal diajukan kebagian kesra dan bagian kesra akan memproses proposal yang diterima, kemudian bagian kesra menentukan tim penilai melakukan penilaian terhadap kelayakan administrasi dan teknik proposal, tim penilai melakukan verifikasi lapangan secara acak terhadap lembaga calon penerima bantuan. Tim verifikasi melakukan rapat dengan pimpinan untuk membahas hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahuilah penerima dana bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu yang layak menerima.

Adapun jangka waktu penerimaan dana bantuan beasiswa yaitu sebagai berikut:

1. Beasiswa diberikan atas usulan perorangan yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan
2. Beasiswa akan diberikan selama 12 bulan
3. Mahasiswa diberikan bantuan pemberian beasiswa hanya 1 tahun, tidak secara otomatis tahun depan mendapatkan lagi. Untuk pengajuan tahun berikutnya harus menunjukkan persyaratan yang telah

ditentukan dan prestasi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

Ketersediaan anggaran merupakan faktor penentu dalam melaksanakan berbagai macam program dari pemerintah, kesadaran yang timbul dikalangan pemerintah daerah akan pentingnya dunia pendidikan. Keterbatasan anggaran merupakan penyebab turunnya anggaran untuk program bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara berikut dapat kita ketahui bahwa yang menjadi faktor penentu dalam melaksanakan program pemerintah itu adalah ketersediaan anggaran, jika anggaran itu terbatas maka anggaran untuk program bantuan beasiswa mahasiswa yang kurang mampu itu akan turun. Dengan keterbatasan anggaran disini pemerintah tentu memerlukan kebijakan dalam membelanjakan anggaran dana yang tersedia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabag Kesra Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Erdison menyatakan bahwa :

Kami sudah melaksanakan peran pemerintah yang diembankan kepada kami tentang bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu mulai dari

menerima, menyeleksi dan mencairkan dana kemudian dengan harapan bisa membantu mahasiswa.

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah sudah melaksanakan peran nya yaitu memberi bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dengan melalui beberapa proses atau tahapan dengan harapan dapat membantu mahasiswa tersebut.

3. Kewenangan pemerintah daerah dalam program bantuan beasiswa kurang mampu

Dengan diberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hendaknya pemerintah daerah dapat menjalankan dengan baik pemerintahannya. Namun sejak bergulirnya program otonomi daerah, maka daerah dtuntut untuk bisa menghidupi diri sendiri dengan meningkatkan sumber daya manusia, salah satu caranya melalui bidang pendidikan. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai

tujuan umum dan khusus yaitu, tujuan umum pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dari program penyaluran beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan tujuan khusus pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan memberikan dorongan agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat lebih berprestasi.

Kriteria penerima beasiswa yang ditentukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Mahasiswa yang sedang studi di Perguruan Tinggi yang berasal dari kabupaten kuantan singingi.
2. Berasal dari keluarga kurang mampu, yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa
3. Pada saat ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa dari Pemerintah kabupaten kuantan singingi tidak sedang menerima bantuan beasiswa lainnya
4. Saat mengajukan sekurang-kurangnya telah menyelesaikan semester 1.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Muharlius menyatakan bahwa :

Pemerintah daerah memberi bantuan beasiswa atau biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tua nya yang kurang mampu agar dapat membantu meringankan bebannya dalam biaya pendidikan, karena pendidikan adalah menjadi kewenangan daerah, dan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam sektor pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah daerah meringankan beban orang tua dari mahasiswa yang kurang mampu dengan memberi bantuan beasiswa atau biaya pendidikan terhadap mahasiswa tersebut. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam sektor pendidikan merupakan urusan dari pemerintah daerah dikarenakan pendidikan menjadi kewenangan daerah, sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut terutama dalam sektor pendidikan.

B. Kendala-kendala dalam Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, maka penulis menemukan kendala-kendala dalam program bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kendala-kendala yang kami hadapi adalah Verifikasi data dan Waktu.

a. verifikasi data

verifikasi data karena banyak menemukan manipulasi data, data-data yang dimaksud adalah permohonan banyak tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabag Kesra Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Erdison menyatakan bahawa:

Saat verifikasi data kami menemukan banyak permohonan yang manipulasi data seperti dalam syarat ada yang tidak sesuai yang ditemukan oleh pegawai kami saat turun kelapangan

Berdasarkan hasil wawancara yang mana pemerintah menemukan banyaknya pemohon atau mahasiswa tersebut memanipulasi data, ketika pegawai dari pemerintah memverifikasi data mahasiswa yang mendaftar untuk menerima bantuan beasiswa yang kurang mampu, yang dimaksud manipulasi data yaitu data atau syarat yang diberikan tidak sesuai dengan aslinya ketika pegawai pemerintah turun kelapangan.

b. Waktu

Merupakan target atau waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah dimana konsekuensi pemerintah terhadap waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa yang mengurus persyaratan bantuan beasiswa kurang mampu dapat diselesaikan dengan ketentuan waktu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kabag Kesra Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

Kalau masalah waktu pelayanan beasiswa kita selalu berusaha menyelesaikan tepat waktu.

Berdasarkan wawancara diatas sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah melakukan pelayanan persyaratan bantuan beasiswa kurang mampu selalu berusaha menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa yang berasal dari kuansing yang menerima beasiswa tersebut menyatakan bahwa:

Waktu yang diperlukan dalam pengurusan persyaratan bantuan beasiswa ini terlalu sedikit, sedangkan persyaratan yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa sangat banyak

Berdasarkan wawancara diatas sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa diharuskan untuk mengumpulkan persyaratan persyaratan, persyaratan untuk mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah, waktu yang ditetapkan untuk mengumpulkan persyaratan terlalu sedikit sedangkan persyaratan yang harus dikumpulkan mahasiswa banyak, sehingga banyak mahasiswa yang mengeluh karna waktu untuk pengumpulan persyaratan sangat sedikit dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan beasiswa tersebut.

E. Kesimpulan

Dalam segi anggaran, untuk bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu terutama bagi sektor pendidikan mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi masih dirasa kurang memadai, hal ini dikarenakan jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah masih bersifat fluktuatif di setiap tahun anggarannya. Hal ini didukung melalui hasil wawancara terhadap anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah terutama untuk sektor pendidikan bergantung pada kemampuan dari APBD daerah tersebut

Dalam segi peran pemerintah daerah, berdasarkan hasil survey lapangan diketahui bahwa dalam hal penyaluran bantuan sektor pendidikan ini masih banyak di temui kecurangan dan bantuan yang tidak tepat sasaran, terutama dalam segi pengawasan dan seleksi penerimaan masih ditemukan beberapa kekurangan diantaranya masih banyak terjadi manipulasi data oleh pemohon serta permainan dari oknum pemerintah itu sendiri yang masih tebang pilih terhadap penerimaan bantuan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran pemerintah dalam menyalurkan bantuan sektor pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diantaranya pertama, jumlah anggaran yang terbatas mengakibatkan naik turunnya anggaran untuk bantuan pendidikan.

Kedua, mahasiswa yang menjadi pemohon beasiswa masih banyak yang memanipulasi data sehingga pemerintah kesulitan dalam verifikasi data di lapangan. Ketiga, pengawasan di lapangan masih sering terjadi kecurangan dari oknum pemerintah itu sendiri.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Cohen, Bruce J. 1983. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: Raja Grafinda Persada

Marzuki, MM, 2003. *Metodologi Riset*. Jogjakarta : PT. Prasetia Widia Pratama

Mirriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Salam Dharma Setiawan. 2007. *manajemen pemerintahan Indonesia* Jakarta: PT. Djambatan

Surbakti, Ramlan. 2010. *memahami ilmu politik*. cetakan ketujuh. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Satori, Djmaan dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta

Soekanto. Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Setyono, Budi. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta:

Center of Academic Publising services (Caps).

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Winardi,J.2003.*Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo. 2012. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian. Jakarta: Magna Script Publishing

SKRIPSI:

Andriyanto.2015. *Efektivitas pelaksanaan pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh dinas pendidikan kota pekanbaru*.Administrasi public.

Mutia olia azmi.2014.*keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini bagi keluarga miskin diperkotaan*.pekanbaru:sosiologi

Rio kusbowo.2015.*upaya pemerintah kabupaten Indragiri hulu dalam pengentasan anak putus sekolah*.ilmu pemerintahan

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Perbup Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penganggaran Bantuan Beasiswa